

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Signifikansi Penelitian

Dalam era globalisasi saat ini, organisasi yang bersifat profit atau non-profit yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi di luar pemerintah mulai banyak menggunakan jasa *public relations*. Peran *public relations* ditujukan untuk membentuk, meningkatkan serta menjaga citra (*image*) yang baik di mata masyarakat. Menurut Kotler dalam Nova (2011), citra adalah persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau produknya, citra di pengaruhi oleh banyak faktor di luar control perusahaan. Maka dapat disimpulkan citra adalah total persepsi terhadap suatu objek yang dibentuk dengan memproses informasi terkini dari beberapa sumber setiap waktu. Perilaku perusahaan mendapatkan perhatian tersendiri oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan apa yang dilakukan oleh perusahaan menjadi cerminan bagaimana perusahaan tersebut. Sehingga berpengaruh terhadap citra yang dibangun untuk menuju pada terbentuknya opini publik. Hal tersebut membuat banyak perusahaan, organisasi atau lembaga-lembaga lainnya sadar akan peran penting seorang *public relations* bagi perusahaan.

Menurut Dr. Rex Harlow dalam Ruslan (2012), *public relations* adalah fungsi manajemen yang khas dan mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur bersama, antara organisasi dengan publiknya, menyangkut aktivitas komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerja sama melibatkan manajemen dalam menghadapi persoalan/permasalahan, membantu manajemen dalam menanggapi opini public. Sedangkan menurut Cutlip dan Center dalam Ruslan (2012) *public relations* merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijaksaan dan tata cara organisasi demi kepentingan

publiknya, serta merencanakan suatu program kegiatan dan komunikasi untuk memperoleh pengertian dan dukungan publiknya.

Untuk menjadi salah satu peran penting dari bagian manajemen perusahaan atau organisasi, menurut menurut Cutlip dan Center dalam Ruslan (2012) *public relations* sejatinya akan menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, dan mengatur arus informasi, publikasi serta pesan dari badan/organisasi ke publiknya atau sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak. Selain itu, *public relations* juga berperan penting dalam membangun dan memberikan informasi baik secara internal maupun eksternal. Publik internal adalah publik yang menjadi bagian dari unit, badan, perusahaan atau organisasi itu sendiri. Sedangkan publik eksternal adalah publik umum (masyarakat) (Ruslan, 2012, hal. 23).

Maka dari itu, *public relations* menjadi solusi terkini bagi perusahaan atau lembaga untuk membentuk sebuah citra dimasyarakat. *Public relations* dapat membangun opini publik, mengembangkan citra positif dan mampu mengadapi krisi yang terjadi. Dalam mengelola citra, *public relations* butuh perencanaan atau strategi untuk menjalankan peran dan fungsi *public relations*. Strategi yang dibentuk sebisa mungkin harus tepat sasaran dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan.

Hal tersebut juga terjadi pada salah satu Badan Usaha Milik Negara yaitu PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero). Pada tahun 2015 PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) mengalami krisis yaitu pemberitaan kasus korupsi oleh Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II yaitu Richard Joost Lino atau yang biasa dipanggil R. J. Lino. RJ Lino diduga menyalahgunakan wewenangnya saat menjadi Dirut Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan atau korporasi dengan memerintahkan penunjukan langsung perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Huangdong Heavy Machinery sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC. Pemberitaan kasus terdakwanya R. J. Lino yang

diduga korupsi pengadaan 10 unit mobile crane di PT. Pelabuhan Indonesia II. Penyelidik KPK melaksanakan gelar perkara dan diputuskan untuk menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor Sprin.Dik.55/01/2015 tertanggal 15 Desember 2015 dengan nama Richard Joost Lino sebagai Direktur Utama PT Pelindo II sebagai tersangka. (Febriyansyah, Andi Refand, dkk, 2016, hal.7)

Selain dugaan korupsi *mobile crane*, terdapat beberapa kasus dugaan korupsi yang telah dilaporkan Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN yaitu, pertama, pembelian lahan PT. Dok Koja Bahari (DKB) pada 2010 yang semula nilai kesepakatan nya Rp 150 miliar tetapi diduga digelembungkan menjadi Rp 350 miliar. Kedua, dugaan korupsi pengadaan sistem Informasi Teknologi dengan nilai mencapai Rp 100 miliar. Ketiga, masalah bongkar muat peti kemas atau *dwelling time* yang dioperasikan tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada tahun 2015 yang membuat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo geram dan kecewa (Febriyansyah, Andi Refand, dkk, 2016, hal.10)

Berdasarkan seluruh kasus yang dialami oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) hingga berita mengenai kasus korupsi oleh R. J. Lino sebagai Direktur Utama Pelindo II, hal tersebut juga dapat mempengaruhi seluruh anak perusahaan dan anak cabangnya dikarenakan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) merupakan *holding company*.

Kasus ini sendiri telah ditangani KPK sejak Desember 2015 lalu. Namun penyelesaian kasus dugaan korupsi di PT. Pelindo II tersebut belum juga rampung hingga saat ini. Kasus korupsi *mobile crane* oleh R. J. Lino tersebut mulai memuncak kembali di berbagai media dikarekan revisi UU KPK. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan salah satu poin yang harus diperbaiki dalam draf revisi UU KPK adalah kewenangan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Jusuf Kalla mencontohkan kasus korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino yang menggantung sejak 2015. Sebagai tersangka, RJ

Lino tak kunjung disidang. Jusuf Kalla menilai, hal itu sangat merugikan RJ Lino karena menghancurkan karier serta nama baiknya. (Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190910173422-12-429185/contohkan-kasus-rj-lino-jk-dukung-sp3-di-revisi-uu-kpk>, diakses pada tanggal 16 September 2019).

Seperti yang dikatakan oleh wakil presiden Jusuf Kalla bahwa kasus ini dijadikan contoh bahwa perlunya revisi UU KPK mengenai kewenangan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Dalam revisi UU KPK mengenai SP3, KPK diberikan kewenangan menghentikan penyidikan dan penuntutan suatu kasus. Masalah itu diatur dalam Pasal 40 yang secara garis besar bahwa KPK bisa menghentikan penyidikan bilamana ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan suatu penyidikan. Kewenangan ini merupakan hal baru bagi KPK karena tak ada dalam UU 30/2002 sebelum direvisi. Sehingga jika UU KPK tentang SP3 ini disahkan hal ini membuka kemungkinan tawar menawar politik dalam penyelesaian suatu perkara korupsi. Bukan tidak mungkin jika perkara besar yang melibatkan aktor-aktor besar dapat dihentikan dengan intervensi dan lobi-lobi politik. Sehingga ada kemungkinan jika ada revisi UU KPK tentang SP3 bilamana terjadi perkara besar yang secara politis melibatkan orang-orang politik penting berkekuatan luar biasa, itu bisa terjadi tawar-menawar politik dengan meng-SP3 kan kasus tersebut.

Dalam kasus yang belum selesai ini tentunya divisi *public relations* dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) hingga dari anak cabang dan anak perusahaan merupakan peranan penting sebagai kunci utama perusahaan untuk menghubungkan antara perusahaan dengan publiknya, juga harus memilih cara yang tepat untuk menanggapi dan mengatasinya. Salah satunya yang harus dilakukan oleh *public relations* PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai *holding company* adalah melakukan strategi *public relations* yang berorientasi pada publikasi pada segala informasi dan konfirmasi, demi meminimalisir atas

isu-isu negatif terhadap pemberitaan kasus yang dapat memberikan dampak yang serius kepada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan seluruh anak cabang serta anak perusahaannya.

Untuk dapat melaksakan tugasnya dengan baik *public relations* harus mempunyai strategi untuk dapat berkomunikasi dengan publiknya. Strategi yang dibangun oleh seorang *public relations* harus dapat menanamkan kepercayaan kepada publik tidak hanya untuk memperoleh citra positif, tetapi citra positif yang sudah dibangun perlu ditingkatkan, karena jika kepercayaan publik luntur akibat citra perusahaan yang negatif maka akan sulit bagi perusahaan untuk meningkatkan citra tersebut. Peranan *public relations* dalam membangun citra positif akan dapat terlaksana dengan adanya strategi yang terencana dan matang.

Dengan demikian, peranan *public relations* dalam kasus yang terjadi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) merupakan hal yang penting dan sangat menguntungkan bagi perusahaan. Hal itu juga dapat saling mendukung dan membantu serta mempertahankan citra perusahaan menjadi lebih baik dan positif jika terjadinya suatu kasus terutama kasus yang dialami PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) mengenai pemberitaan kasus korupsi R. J. Lino ini. Berdasarkan penjelasan diatas penulis ingin mengetahui Strategi *Public Relations* PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dalam memperbaiki citra dan apa kendala yang dimiliki saat menjalankan strategi *public relations*.

## 1.2 Fokus Penelitian

Penelitian yang berjudul “Analisis Strategi *Public Relations* dalam Memperbaiki Citra Perusahaan (Studi Kasus PT Pelabuhan Indonesia II Pasca Penetapan Direkur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II Sebagai Tersangka Korupsi)” ini akan fokus membahas mengenai strategi public relations PT Pelabuhan Indonesia II dalam memperbaiki citra perusahaan.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin menganalisa bagaimana strategi yang dilakukan *public relations* dalam memperbaiki citra PT Pelabuhan Indonesia II pasca ditetapkannya direktur utama PT Pelabuhan Indonesia II sebagai tersengka korupsi. Serta apa kendala yang dimiliki *public relations* PT Pelabuhan Indonesia II saat melaksanakan strategi *public relations* dalam memperbaiki citra perusahaan pasca terkena kasus?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penulis merumuskan bahwa penelitian ini memiliki tujuan-tujuan yang mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan penelitian diatas, yaitu untuk mengetahui strategi *public relations* dalam memperbaiki citra PT Pelabuhan Indonesia II pasca ditetapkannya direktur utama sebagai tersangka korupsi dan juga mengetahui kendala yang dimiliki *public relations* PT Pelabuhan Indonesia II saat menjalankan strategi *public relations* dalam memperbaiki citra perusahaan pasca terkena kasus.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Mengacu pada pertanyaan dan tujuan penelitian diatas, diharap penelitian ini mampu berikan manfaat diantaranya:

#### **1.5.1 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai strategi *public relations* yang dapat dilakukan jika suatu perusahaan mengalami krisis. Penelitian ini juga diharapkan bisa menghasilkan analisis yang tepat untuk memberikan kontribusi yang baik jika ada yang ingin mengambil topik analisis yang sama dengan peneliti, yaitu strategi *public relations*.

#### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Harapan peneliti, dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan dampak positif kepada semua pihak khususnya praktisi komunikasi.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penyusunan, proposal skripsi disusun secara sistematis mengikutin struktur yang telah ada dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat signifikasi penelitian, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PENELITIAN**

Bab ini berisi lima penelitian terdahulu sebagai bahan bacaan, pemaparan konsep-konsep penelitian yang relevan sebagai bahan pendukung skripsi yang dikerjakan, sesuai konsep yang diangkat sebagai bahan penelitian, teori penelitian dalam konteks penelitian dan kerangka berpikir

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan berbagai hal mengenai metodologi, antara lain metode penelitian, metode pengumpulan data, penentuan informan, teknik analisis data, teknik keabsahan data juga waktu dan lokasi penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dari analisa wawancara dan mengaitkannya dengan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

Berisikan sumber – sumber dan referensi bacaan, baik dari buku, Skripsi terdahulu, jurnal, ataupun artikel yang menjadi pendukung penulisan penelitian.